

Peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani melalui Program Bantuan Peningkatan Produksi dan Produktivitas di Kabupaten Sampang

Ahmad Fahrul Fausi¹⁾, Nihayatus Sholichah^{2), 3)}

^{1) 2) 3)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Email: sifaa7003@gmail.com

ABSTRAK

Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja, dan penanggulangan kemiskinan. Sektor pertanian juga disebut sebagai tulang punggung dalam perekonomian. Oleh karena itu, negara memprioritaskan pertanian dan ketahanan pangan penduduk dalam situasi sosial sebagai suatu hal yang penting bagi pembangunan manusia. Peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program Bantuan Benih Padi dan Jagung Kabupaten Sampang telah berjalan dengan baik. Hasil tersebut belum mencapai nilai optimal yang diharapkan. Bahwasanya peneliti masih menemukan beberapa pernyataan dalam indikator peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya sebagai peran fasilitator, peran inovator, peran modernisator, dan peran pelopor. Peran pelaksanaan diri dalam membantu kelompok tani mendapatkan akses dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dalam hal ini, mereka telah menyediakan UPT Pertanian setiap kecamatan untuk memudahkan petani untuk mendapatkan akses langsung dengan pemerintah.

Kata Kunci: Pertanian, Pembangunan Manusia, Pemerintah

Abstract

The role of agriculture is very strategic in supporting the national economy, especially in realizing food security, increasing competitiveness, absorbing labor, and reducing poverty. The agricultural sector is also referred to as the backbone of the economy. Therefore, the state prioritizes agriculture and food security of the population in social situations as an important matter for human development. The government's role in improving community welfare through the Sampang Regency Rice and Maize Seed Assistance Program has worked well. The results have not yet reached the expected optimal value. That researchers still find several statements in the indicators of the role of the government in improving community welfare, including the role of facilitator, the role of innovator, the role of modernizer, and the role of pioneer. The role of self-implementation in helping farmer groups gain access to the Agriculture and Food Security Service. In this case, they have provided UPT Agriculture in each sub-district to make it easier for farmers to get direct access to the government.

Keywords: Agriculture, Human Development, Government

A. LATAR BELAKANG

Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja, dan penanggulangan kemiskinan. Sektor pertanian juga disebut sebagai tulang punggung dalam perekonomian. Oleh karena itu negara memprioritaskan pertanian dan ketahanan

pangan penduduk dalam situasi sosial sebagai suatu hal yang penting bagi pembangunan manusia.

Kementerian Pertanian menyatakan bahwa tujuan utama pembangunan pertanian adalah menyediakan pangan bagi 273 juta jiwa penduduk di seluruh Indonesia, meningkatkan kesejahteraan petani, dan meningkatkan ekspor melalui peningkatan nilai tambah. Indonesia

salah satu negara yang terdampak El Nino dan saat ini ada krisis pangan global, salah satu akibatnya negara India, Myanmar, dan Vietnam menahan produk mereka agar tidak dijual untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kementan terus berupaya untuk menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman krisis pangan global dan perubahan iklim ekstrim yang belum usai.

Permasalahan stabilitas harga pangan di pasaran menjadi tantangan bagi insan pertanian saat ini, maka Kementan telah menetapkan arah kebijakan pembangunan pertanian dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki baik Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) serta memanfaatkan teknologi mutakhir, mekanisasi, dan korporasi dari hulu hingga hilir. Indonesia akan kembali mencapai swasembada pangan, terutama dalam produksi padi dan jagung, seperti yang terjadi pada tahun 2017, 2019, dan 2020 dimana Indonesia mencapai swasembada pangan. Kementan menargetkan pada tahun 2023 untuk produksi beras sebesar 32 juta ton dan produksi jagung sebanyak 16 juta ton. Sementara di tahun 2024, produksi beras ditargetkan 34 juta ton dan jagung 18 juta ton. Untuk mencapai target ini, Kementan mengalokasikan bantuan Program Upaya Khusus akselerasi produksi tahun 2024 untuk padi 2 juta hektare dan jagung sebesar 2,1 juta hektare.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 44/KPTS/RC.210/R/11/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2023 bahwa bantuan benih padi dan jagung yang diberikan kepada kelompok petani wajib diusulkan melalui aplikasi E-Proposal Elektronik. Usulan calon penerima dan calon lokasi dari Dinas Pertanian Kabupaten atau Kota yang telah mendapat persetujuan dari Dinas Pertanian Provinsi disampaikan kepada Direktorat Perbenihan.

Selain itu, kriteria penerima bantuan kelompok tani harus tercatat di Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) yang ada di Kementerian Pertanian dengan tujuan supaya kelompok tani tercatat dalam

artinya produksi dan produktivitas hasilnya. Bantuan benih tersebut diberikan kepada petani melalui kelompok tani. Mekanisme pemberian bantuan benih tersebut dilakukan dengan pengajuan proposal dari usulan kelompok tani yang dibawa ke Musrenbang Kecamatan.

Setelah itu disalurkan aspirasi tersebut ke forum OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan setelah dibahas pada forum OPD maka usulan tersebut dilanjutkan ke tingkat provinsi maupun tingkat pusat. Dari usulan proposal tersebut tidak semua usulan yang diajukan bisa diterima. Mengingat adanya keterbatasan anggaran baik dari anggaran pusat maupun anggaran dari provinsi. Selanjutnya jika dilihat dari periode pemberian bantuan benih, pemberian tersebut juga tidak ada patokan waktu yang sama atau tidak diberikan secara periodik. Dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga tidak ada periode waktu dalam pemberian bantuan benih kepada petani. Benih yang diberikan adalah benih dengan jenis yang sesuai dengan kebutuhan atau kecocokan dengan daerah tersebut.

Peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Disperta KP) Kabupaten Sampang dalam upaya meningkatkan jumlah produksi dengan menyalurkan bantuan benih padi varietas unggulan yang berasal dari Kementerian Pertanian untuk kelompok tani di Kabupaten Sampang sebanyak 75 ton bibit padi yang akan disalurkan dengan rekapan lahan 7.000 hektare untuk memasuki musim tanam baru. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, Jawa Timur, menyalurkan bantuan bibit padi ke sejumlah kecamatan di kabupaten setempat. Hanya saja, dari 14 kecamatan yang ada, hanya separuhnya yang mendapatkan bantuan benih padi, sedangkan separuhnya mendapatkan bibit jagung. Bantuan benih tersebut biasanya setiap tahun ada hanya kuotanya terbatas tidak bisa memenuhi kebutuhan kelompok petani seluruhnya.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang dalam mengantisipasi fenomena El Nino dan krisis global perlu memberikan membangun prasarana dan sarana pertanian secara terintegrasi seperti ketersediaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) untuk

percepatan tanam dan pemberian bantuan bibit unggul, akses permodalan, dan modernisasi pertanian dalam skala yang lebih luas, sehingga kesejahteraan petani dapat terealisasi dan anak petani diberikan beasiswa.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani melalui Program Bantuan Peningkatan Produksi dan Produktivitas di Kabupaten Sampang”.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Peran Pertanian

Sektor pertanian mempunyai peran kunci pada penyediaan kebutuhan pangan rakyat Indonesia, memiliki wujud kontribusi yang nyata dalam pemenuhan kebutuhan bahan pangan, bahan baku industri, *bioenergy*, dan juga penyerapan tenaga kerja yang akan berbanding lurus hasilnya dengan penurunan kemiskinan dan pelestarian lingkungan (Slr & Waromi, 2021).

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002: 243), yaitu aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut Gibson Ivancevich dan Donnelly (2002), peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan dua sistem yang berbeda, biasanya organisasi. Kemudian menurut Riyadi (2002:138), peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya.

Menurut Himawar (2004:51) peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh

seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris yaitu *function*, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan atau lembaga yang menempati atau mengaku suatu posisi dalam sistem sosial.

Sektor pertanian merupakan sektor yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, pengembangan dan pembinaanya harus terus dilakukan oleh pemerintah seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kepercayaan diri bagi pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kabupaten Sampang untuk melakukan pembinaan, pelaksanaan, dan kerja teknis pada masyarakat terutama pada masyarakat petani sesuai dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Penumbuhan, Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani yang bertujuan sebagai berikut:

- a) Memberdayakan petani agar memiliki kekuatan mandiri dan mampu melakukan inovasi (teknis, sosial, dan ekonomi), sehingga dapat memperoleh tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang layak serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

- b) Meningkatkan peranan kelembagaan petani dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Sampang.
- c) Pedoman pelaksanaan pembinaan kepada kelembagaan petani bagi lembaga penyuluhan dan/atau dinas terkait lingkup pertanian di Kabupaten Sampang.
- d) Terwujudnya pelaksanaan pembinaan kepada kelembagaan petani secara terpadu dan bersinergi antara lembaga penyuluhan dengan dinas terkait lingkup pertanian.
- e) Meningkatkan kemampuan kelembagaan petani dalam hal pengetahuan, ketrampilan, dan sikap agar mampu mengelola usaha taninya secara mandiri serta tangguh dalam menghadapi hambatan dan permasalahan yang timbul pada waktu melaksanakan kegiatan usaha tani.

Berdasarkan pengertian diatas, peranan Dinas Pertanian dapat diartikan sebagai serangkaian tingkah laku yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani, bentuk kelembagaan, penumbuhan kelembagaan petani, hak dan kewajiban, pembekuan kelembagaan, monitoring, serta evaluasi, sehingga perkembangan pertanian ke arah yang lebih baik guna mencapai pertanian yang modern.

Sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Terutama jika dikaitkan dengan kondisi masyarakat Indonesia bermatapencaharian sebagai petani. Sudah seharusnya pembangunan Indonesia dapat difokuskan pada pemberdayaan peningkatan fungsi pertanian untuk mencapai tingkat kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat sudah seharusnya dilakukan upaya-upaya dalam rangka pembangunan pertanian.

2. Kesejahteraan Petani

Menurut Sunarminto dalam penelitian Seka (2019), petani merupakan kegiatan

budidaya pangan melalui aktivitas pertanian yang dilakukannya. Petani dalam pengertian secara umum adalah sebuah kelompok profesi yang lebih spesifik dari profesi yang lain. Petani merupakan profesi yang sangat natural karena muncul secara otomatis untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kehidupan mereka sehari-hari, hampir diseluruh konsep budaya manapun tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian. Untuk memenuhi kebutuhan itu, setidaknya petani harus mampu memperoleh penghasilan yang tidak kurang dari yang diterima pada tahun-tahun sebelumnya. Tanah yang dikerjakan tersebut dipergunakan dalam kegiatan usaha untuk mendatangkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Secara tegas, kemampuan tanah tersebut tidak dapat berkurang dengan kata lain kemampuan tanah tersebut harus tetap (Yuli, 2011:18).

Kesejahteraan menurut pandangan masyarakat modern yaitu suatu kondisi dimana kebutuhan pokok seseorang dapat terpenuhi, baik itu kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang layak yang dapat mengangkat derajat kualitas hidupnya sehingga bisa mempunyai status sosial terhadap warga lainnya. Menurut Garda maeswara dalam Ellyana Kusumawardhani (2014) menjelaskan kesejahteraan merupakan rasa nyaman masyarakat karena terpenuhinya keinginan lahir dan batin. Kesejahteraan lahir meliputi kesejahteraan ekonomi sosial seperti kesejahteraan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kesejahteraan batin, itu yang bersifat emosional, intelektual, dan spiritual masyarakat.

Kesejahteraan menurut David McClelland dalam Anwar Abbas (2010:161) adalah kesejahteraan didapatkan ketika seseorang mempunyai etos kerja yang baik. Seseorang itu sendirilah yang mempunyai tanggung jawab atas masa depannya terhadap kesejahteraannya. Hal ini akan terjadi ketika seseorang itu bisa menjadi pesaing yang baik

dan mempunyai tingkat keinginan untuk berprestasi di dalam diri sendiri Luthfi J. Kurniawan, dkk (2015:11).

Berdasarkan pengertian kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan adalah suatu kondisi seseorang yang dipertanggung jawabkan atas kebutuhannya melalui semangat kerja yang baik. Sehingga, segala kebutuhannya dapat terpenuhi baik itu kebutuhan material maupun non material, yang dapat dilihat dari pendapatan yang diterima, kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan menyeluruh, serta pendidikan yang mudah dijangkau.

Kesejahteraan berkarakter sangat luas yang diterapkan di skala sosial besar dan kecil sebagai contoh keluarga dan individu. Konsep kesejahteraan atau rasa sejahtera yang bersifat relatif, tergantung dari penilaian masing-masing individu. Sejahtera menurut seseorang dengan tingkat pendapatan tertentu belum tentu dapat dinamakan sejahtera bagi orang lain (Regina Arisandi, 2016). Sejahtera dapat didefinisikan sebagai kondisi yang menunjukkan pada kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi, serta manakala manusia dapat memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya (Salamah, 2012:1).

Kesejahteraan petani merupakan tantangan pemerintah daerah di era otonomi. Otonomi daerah hendaknya mendekatkan pemerintah kepada petani, menunjukkan kepedulian kepada petani dan pertanian, mempercepat pemecahan masalah petani dan pertanian. Dengan otonomi daerah, Pemda memiliki posisi strategis dengan keleluasaan untuk meneruskan kebijakan dan program pembangunan pertanian yang semakin fokus, bisa menemukan komoditas unggulan sesuai potensi lokal, dan mengenal berbagai upaya inovasi nilai tambah produk pertanian.

Dengan otonomi, idealnya permasalahan yang dihadapi petani dan pertanian dengan cepat diketahui dan diberikan solusi yang memadai.

Unsur penting yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani adalah tingkat pendapatan petani. Walaupun demikian tidak selalu upaya peningkatan pendapatan petani secara otomatis diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani, karena kesejahteraan petani juga tergantung pada nilai pengeluaran yang harus dibelanjakan keluarga petani serta faktor-faktor non-finansial seperti faktor sosial budaya. Oleh karena itu, dalam kerangka peningkatan kesejahteraan petani, prioritas utama Kementerian Pertanian adalah upaya meningkatkan pendapatan petani.

Sebagai salah satu negeri yang mempunyai potensi pertanian yang cukup besar, sektor pertanian hingga kini masih tetap memiliki peranan yang strategis dalam pembangunan nasional bangsa Indonesia. Agar sasaran pembangunan pertanian yang dimaksudkan untuk tetap mampu mempunyai kontribusi yang nyata dalam perekonomian indonesia tersebut dapat dicapai, maka upaya-upaya khusus perlu dikembangkan.

3. Landasan Hukum Bantuan Pemerintah Lingkup Direktur Jenderal Pertanian

Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2023 berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

- a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.
- b) Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.
- c) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

- d) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023.
- e) Keputusan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 44/KPTS/RC.210/B/11/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2023.
- f) Peraturan Bupati Sampang Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang.
- g) Peraturan Bupati Sampang Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Penumbuhan, Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani di Kabupaten Sampang.

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang tidak memerlukan kuantifikasi. Menurut Sugiyono (2018:213) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data, dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna.

Metodologi penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau objek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara individu atau kelompok. Peneliti kualitatif, mereka yang terlibat dalam bentuk penyelidikan ini memiliki asumsi tentang pengujian teori secara deduktif, membangun perlindungan terhadap bias, mengendalikan alternatif atau penjelasan kontrafaktual, dan mampu menggeneralisasi dan mereplikasi temuan.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong, 2010). Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini.

Berdasarkan fokus penelitian penulis dapat membatasi bidang-bidang temuan dengan arahan fokus penelitian tersebut, dengan demikian penelitian dapat terarah dengan baik. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menetapkan indikator-indikator penelitian ini yaitu peran pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh Siagian (2000: 142-150) yang meliputi peran sebagai fasilitator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksanaan diri.

3. Lokasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2008:119), lokasi penelitian adalah tempat ketika akan diadakannya sebuah penelitian atau observasi dalam rangka untuk memperoleh sebuah data yang akurat untuk sebuah penelitian. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan instansi Pemerintahan yang cukup vital dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat petani dan berkewajiban untuk terus memproduksi pangan sesuai dengan potensi yang ada, guna dapat memenuhi kebutuhan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam meningkatkan kesejahteraan petani meliputi beberapa indikator, diantaranya yaitu:

1. Peran Fasilitator

Fasilitator adalah orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama.

Fasilitator bukanlah seseorang yang bertugas hanya memberikan pelatihan, bimbingan nasihat, atau pendapat. Fasilitator harus menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan. Dalam penelitian ini peneliti berusaha mencari dan menemukan program yang sesuai dengan kebutuhan petani di Kabupaten Sampang. Dinas pertanian dan ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, dalam perannya sebagai fasilitator memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh petani sebagai bahan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat atau petani.

Berdasarkan jawaban dan pernyataan dari narasumber, dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Pertanian dalam membantu meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Sampang sudah dikatakan maksimal sejauh yang peneliti pantau di lapangan, selain memberikan bantuan berupa benih, pupuk maupun obat-obatan untuk pemberantasan hama. Dinas pertanian Kabupaten Sampang sebagai dinas yang diprioritaskan di bidang pertanian menyelenggarakan penyuluhan di seluruh wilayah Kabupaten Sampang secara merata sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagai dinas guna untuk memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan para petani.

2. Peran Inovator

Seorang inovator selalu mengamati suatu gagasan, barang, atau metode yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Mereka adalah pengamat yang handal, karena sambil mengamati mereka berpikir untuk mencari tahu apa yang masih kurang dan dapat dikembangkan dari inovasi yang telah ada. Mereka selalu mencari cara untuk membuat inovasi yang semakin memudahkan manusia dalam beraktivitas. Hal ini juga yang membuat mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi karena mereka selalu mempertanyakan apa yang ada dan dilakukan oleh orang sekitar.

Setiap tindakan yang dilakukan sehari-hari saja tidak jarang mengandung resiko, apalagi bagi seorang inovator.

Seorang inovator adalah mereka yang berani mengambil risiko. Mereka siap dengan segala eksperimen beserta segala risikonya. Karena menurut mereka, keberhasilan sangat dipengaruhi oleh semangat yang tinggi. Keberanian dibutuhkan oleh seorang inovator karena akan menghindarkan mereka dari keterpurukan dan keputusan. Mereka akan berfikir positif dengan membayangkan kesuksesannya di masa depan hingga termotivasi untuk bekerja lebih giat dan tidak mudah putus asa.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang merupakan salah satu unsur pemerintahan di Kabupaten Sampang. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang memiliki tanggung jawab membina dan mengembangkan para petani dalam mengelolah lahannya sehingga dapat tercapai masyarakat petani yang sejahtera. Peranan Dinas Pertanian Kabupaten Sampang dalam menentukan program kegiatan yang tepat sasaran.

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai inovator, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga penyuluh pertanian, dan mengembangkan model-model pembelajaran pertanian yang inovatif.

3. Peran Modernisator

Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu:

- a) Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran.

- b) Harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.

Pelaksanaan semua program dan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran, mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dalam satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan antar OPD lainnya, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing OPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, difasilitasi melalui Forum OPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sampang.

4. Peran Pelopor

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang sudah melakukan penyuluhan terhadap para petani. Mereka mendirikan ruang penyuluhan di lapangan untuk memudahkan petani untuk mendapatkan pengetahuan atau ilmu yang *update* untuk meningkatkan hasil panen yang berkualitas sehingga dapat menambah *income* untuk keluarga petani.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di lapangan dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program Bantuan Benih Padi dan Jagung Kabupaten Sampang telah berjalan dengan baik. Hasil tersebut belum mencapai nilai optimal yang diharapkan. Bahwasanya peneliti masih menemukan beberapa

pernyataan dalam indikator peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dipaparkan sebagai berikut:

- a) Peran fasilitator, dimana pemerintah dalam membantu masyarakat tani mendapatkan hasil produksi yang baik pemerintah sudah memberikan bantuan berupa bibit, pupuk, maupun obat-obatan untuk membasmi hama penyakit tanaman.
- b) Peran inovator, dimana pemerintah dalam mendorong kelompok tani untuk meningkatkan hasil produksi pertanian, contohnya mereka membelikan bibit yang unggul, pupuk yang bersubsidi, juga obat-obatan sehingga hasil produksi yang diperoleh akan meningkat pesat tanpa adanya hambatan.
- c) Peran modernisator, dimana peran pemerintah dalam mendorong petani untuk mau menggunakan teknologi baru. Dalam mendorong masyarakat tani, pemerintah telah menyediakan alat teknologi untuk bertani contohnya hand traktor, traktor besar, alat penggiling, alat mencangkul dan sebagainya.
- d) Peran pelopor yaitu pemerintah memberikan pelatihan terhadap petani saat melakukan penyuluhan. Dalam hal tersebut pemerintah sudah menyediakan sekolah lapang untuk memudahkan masyarakat tani untuk belajar tentang bertani yang baik.
- e) Peran pelaksanaan diri, dalam membantu kelompok tani mendapatkan akses dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dalam hal ini mereka telah menyediakan UPT Pertanian setiap kecamatan untuk memudahkan petani untuk mendapatkan akses langsung dengan pemerintah.

2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, berikut peneliti akan menyampaikan beberapa rekomendasi yang sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan

dalam pelaksanaan peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program Bantuan benih padi dan jagung di Kabupaten Sampang adalah perlu adanya pembuatan Standar Operasional Prosedur pada setiap mekanisme baik itu mekanisme pengadaan, pengelolaan, maupun penyaluran.

REFERENSI

- Bukhtiarova, A., Hayriyan, A., Chentsov, V., & Sokol, S. (2019). Modeling The Impact Assessment of Agricultural Sector on Economic Development as a Basis For The Country's Investment Potential. *Investment Management and Financial Innovations*, 16(3), 229–240.
- Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ellyana K. (2014) Pelaksanaan Program PNPM Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. *Skripsi*. Semarang: Universitas Veteran Semarang.
- Peraturan Bupati Sampang Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang.
- Regina, E. (2016). Tingkat Kesejahteraan Petani Rotan di Desa Babai Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 3(4), 60–72.
- Salamah, U. (2012). *Pengantar Ilmu Sejahtera*. Bandung: Insan Akademika.
- Sukmana, Oman., Kurniawan, Luthfi, J., Abdussalam., & Masduki. (2015). *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial: Perspektif Kebijakan Sosial yang Memberikan Jaminan Perlindungan Warga Negara*. Malang: Setara Press.
- Sunyoul, U. (2004). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thoha, M. (2012). *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar. dan Implikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Yudhistira, Andhika, et al. (2020). Analisis Ketimpangan Pendapatan Petani Padi di Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. *Jurnal Agridevina*, 9(1). 60–72.

